

Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM Pengrajin Mebel Desa Catak Gayam, Mojowarno

Evi Puji Lestari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi : evipujilestari863@gmail.com

Abstrak

SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang dikhususkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti UMKM. SAK EMKM mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM diterbitkan untuk mempermudah UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi riil UMKM pengrajin mebel. Data yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 3 UMKM pengrajin mebel Desa Catak Gayam Kecamatan Mojowarno yang mewakili kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Hasil penelitian pada 3 UMKM pengrajin mebel yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi ditemukan bahwa ketiga UMKM tersebut belum siap menerapkan SAK EMKM dalam laporan keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ketiganya belum mengetahui dan memahami tentang SAK EMKM, belum pernah membuat laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan, tidak ada pegawai khusus untuk menyelenggarakan pembukuan.

Kata Kunci : Kesiapan, SAK EMKM, UMKM

Abstract

SAK EMKM is an accounting standard specifically for entities that do not have public accountability such as MSMEs. SAK EMKM came into effect on January 1, 2018. SAK EMKM was issued to facilitate MSMEs in preparing financial statements. This study is intended to find out how ready MSMEs are in implementing the SAK EMKM, as well as the benefits of using financial statements to support business performance. The research method used is descriptive qualitative method, which aims to describe the real conditions of MSMEs furniture craftsmen. The data used in this study are primary data obtained through observation, interviews, and documentation techniques in 3 MSMEs furniture craftsmen in Catak Gayam Village, Mojowarno Subdistrict, which represent the criteria for micro, small and medium enterprises. Data analysis techniques used the analysis of Miles and Huberman models. The results of research on 3 furniture MSMEs, namely UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, and Morodadi Furniture found that the three MSMEs did not ready to implementation EMKM Financial Accounting Standards in their financial statement. That's because the three MSMEs did not know about EMKM Financial Accounting Standards. Three MSMEs do not yet know and understand about EMKM Financial Accounting Standard, never made financial statement whic guide by financial accounting standart, there are no special employee to make financialstatment.

Key word: Readiness MSMEs, SAK EMKM, MSMEs

A. Pendahuluan

Sejak krisis moneter hingga saat ini UMKM memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja hingga 97,2 persen. Dengan prosentase penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia. seperti yang dipaparkan oleh meldoko dalam (tribunnews.com, 2018). Jumlah UMKM di Indonesia juga semakin meningkat pada tahun 2017 mencapai 59 juta. Namun perkembangan usaha pada UMKM masih mengalami beberapa kendala. Pelaku UMKM seringkali mengalami kendala internal maupun eksternal dalam kegiatan bisnisnya. Salah satu kendala internal UMKM yang dikutip dari (jawapos.com, 2018) kekurangan modal untuk mengembangkan usaha masih menjadi kendala utama. Hal ini dikarenakan sulitnya para pengusaha UMKM mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang disebabkan kurang memenuhi persyaratan. Salah satu syarat

untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yaitu setidaknya perusahaan harus memiliki laporan keuangan.

Laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman modal, yang lebih penting lagi bagi perusahaan laporan tersebut dapat digunakan manajemen sebagai informasi dan evaluasi kinerja perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan pelaku UMKM dapat mengukur tingkat keberhasilan dari usahanya paling tidak mereka dapat mengetahui besarnya keuntungan maupun kerugian bersih dari usaha yang dijalankan. Mereka juga dapat menggunakan laporan keuangan tersebut untuk mengetahui posisi keuangan, laba atau rugi dengan angka yang pasti dan dapat melakukan efisiensi biaya pada perusahaan. Namun seringkali para pelaku UMKM tidak memperhatikan pentingnya pengelolaan keuangan tersebut.

Kemampuan manajemen pada UMKM masih sangat rendah. Pelaku UMKM masih belum menganggap penting penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Karena pelaku UMKM belum memahami manfaat dan proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu UMKM belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten dibidang akuntansi. Sehingga UMKM merasa kesulitan untuk menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan.

Keterbatasan kemampuan UMKM dalam menerapkan SAK ETAP membuat Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan standar baru khusus bagi entitas mikro kecil menengah yaitu SAK EMKM yang diberlakukan sejak 01 Januari 2018. Standar akuntansi EMKM ini dibuat lebih sederhana agar mudah untuk diterapkan oleh pelaku UMKM. Standar akuntansi ini diterbitkan untuk membantu UMKM di Indonesia yang memiliki prospek usaha yang baik namun tidak memiliki akses permodalan baik yang bersumber dari perbankan. Sehingga dengan adanya standar khusus ini UMKM dapat membuat laporan keuangan yang akan mempermudah usahanya untuk mendapatkan pinjaman bank (*Russel bedford SBR, 2017*).

Berkaitan dengan adanya standar akuntansi yang baru maka perlu bagi UMKM mempersiapkan diri untuk menerapkan standar akuntansi EMKM pada laporan keuangan mereka. Karena masih banyak ditemukan UMKM yang belum siap untuk menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Rahmawati, T. dan Puspasari, O.R (2016 : 532), hasil penelitiannya menyebutkan sebanyak 95% UMKM di Kabupaten Kuningan belum paham tentang SAK ETAP. Dan hanya 5% UMKM yang sudah paham. Selain itu penilaian tentang pentingnya laporan keuangan untuk perkembangan usaha hanya 7% UMKM yang menganggap sangat penting, 74% menganggap penting, dan sisanya menganggap laporan keuangan tidak penting. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak UMKM di Kabupaten Kuningan yang belum siap untuk menerapkan standar akuntansi karena beberapa alasan yang dimilikinya. Seperti halnya beberapa UMKM yang berada di Mojowarno yang masih banyak menemukan kendala dalam penyusunan laporan keuangan. karena kurangnya pengetahuan mengenai manfaat penting pembukuan untuk kemajuan usahanya.

Kecamatan Mojowarno merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Jombang yang memiliki 881 UMKM yang terdiri dari 2 industri sedang, 41 industri kecil, dan 838 industri mikro (Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2017: 216). Selain itu kecamatan Mojowarno merupakan salah satu dari empat kecamatan pengungkit ekonomi kabupaten Jombang. Wilayah pengungkit ekonomi merupakan wilayah yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. wilayah pengungkit ini dilihat dari banyaknya jumlah usaha yang ada dan besarnya angka penyerapan tenaga kerja. Kecamatan mojowarno menjadi wilayah pengungkit ketiga dengan daya serap tenaga kerja yang terbesar ada pada Usaha Mikro Kecil. Karena jumlah UMK di wilayah Mojowarno lebih banyak dibandingkan dengan jumlah UMBnya (Badan Pusat Statistik, 2017: 70-73).

Mojowarno merupakan kecamatan yang terkenal dengan kerajinan mebel terbesar di kabupaten Jombang. Desa Catak Gayam merupakan salah satu desa yang mayoritas usaha disana adalah pengrajin mebel. Sebagian besar UMKM tidak mampu membuat laporan keuangan dengan baik dan benar. Karena beberapa permasalahan terutama terkait dengan pemahaman terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan yang masih sangat terbatas. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimanakesiapan UMKM pengrajin mebel desa Catak Gayam, Mojowarnountuk mengimplementasikan SAK EMKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi bagi kepentingan beberapa pihak yaitu, praktisi, akademisi, dan regulator.

B. Landasan Teori

Teori Kesiapan

Kesiapan merupakan suatu keadaan seseorang yang akan membuatnya mampu menghadapi perubahan yang terjadi. Menurut Sanusi (2005:22) dalam Fatchurrochman, R. 2011 “kesiapan merupakan kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu”. Menurut Slameto (2010:113) dalam Mulyani, D. 2013, “kesiapan adalah keseluruhan kondisi individu yang menjadikannya siap untuk merespon atau memberikan jawaban dengan cara tertentu terhadap situasi tertentu”.

Penelitian Rahmawati, T dan Puspasari, O.R (2016) penilaian kesiapan UMKM dalam menerapkan standar akuntansi keuangan dapat diketahui dari pemahaman pelaku usaha tentang standar akuntansi keuangan, pelaku usaha telah melakukan Pembukuan secara rutin, terdapat pegawai khusus pembukuan, terdapat software akuntansi, pembukuan berpedoman pada standar akuntansi.

Kesiapan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana kesiapan para pelaku UMKM yang akan melakukan perubahan dari standar akuntansi sebelumnya menuju SAK EMKM. Kesiapan ini dapat diketahui dari seberapa paham para pelaku usaha tentang SAK EMKM dan apakah UMKM sudah membuat pembukuan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku sebelumnya. Apakah UMKM memiliki sumber daya manusia yang mampu melakukan pembukuan, atau UMKM telah menggunakan software akuntansi dalam menginput transaksinya. Jika ternyata pelaku UMKM tidak mengetahui sama sekali tentang SAK EMKM dan tidak pernah membuat pembukuan, tidak memiliki SDM khusus pembukuan, tidak memiliki software akuntansi, maka UMKM tersebut dinilai belum siap untuk menerapkan SAK EMKM. Namun jika UMKM telah memahami tentang SAK EMKM dan telah membuat pembukuan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan, maka UMKM tersebut dinilai telah siap menerapkan SAK EMKM.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam SAK EMKM sebagai berikut;

“Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa industri menengah adalah usaha yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 20 – 99 orang. Industri kecil adalah usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang. Sedangkan industri mikro adalah usaha yang memiliki tenaga kerja sebanyak 1-4 orang.

Kriteria UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut;

Usaha Mikro : memiliki aset bersih maksimal Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan maksimal Rp. 300.000.000,-

Usaha Kecil : memiliki aset bersih sebanyak Rp 50.000.000 s/d Rp 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan sebanyak Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000,-

Usaha Menengah : memiliki aset bersih sebanyak Rp 500.000.000 s/d Rp 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan omzet penjualan sebanyak Rp 2.500.000.000 – Rp 50.000.000.000,-

Standar Akuntansi Keuangan EMKM

SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dalam peraturan undang-undang setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Dalam SAK EMKM laporan keuangan entitas minimal terdiri dari:

(a) Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: 1) kas dan setara kas; 2) piutang; 3) persediaan; 4) aset tetap; 5) utang usaha; 6) utang bank; 7) ekuitas.

(b) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

(c) Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan memuat: 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM; 2) ikhtisar kebijakan akuntansi; 3) informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga **bermanfaat** bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Pengukuran dan pengakuan Pos-pos dalam Laporan Keuangan

1) Aset dan liabilitas keuangan

Aset dan liabilitas keuangan diakui ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual dan diukur sebesar biaya perolehannya. Pada akhir periode laporan aset dan liabilitas diukur pada harga transaksi dikurangkan dengan seluruh pembayaran sampai pada tanggal tersebut.

2) Persediaan

Pengakuan persediaan sebesar harga perolehan. Teknik pengukuran biaya dapat menggunakan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Jika terdapat persediaan yang rusak atau usang, diakui sebagai beban pada periode terjadinya.

3) Investasi pada ventura bersama

Investasi pada ventura bersama diukur dengan biaya perolehannya dan tidak ada pengakuan ketika terjadi penurunan nilai atas investasi.

4) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran, maka biaya perolehan diukur sebesar harga aset yang diserahkan.

5) Penyusutan

Pengakuan terhadap aset tetap dihentikan ketika aset tetap dilepaskan, atau ketika sudah tidak ada manfaat ekonomiknya. Pengakuan keuntungan atas penjualan aset dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pengakuan kerugian ketika aset diserahkan maupun dimusnahkan dicatat sebagai beban lain-lain.

6) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah dicatat sebagai beban dibayar dimuka sebesar biaya perolehan. Jika aset dihasilkan secara internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

7) Liabilitas dan ekuitas

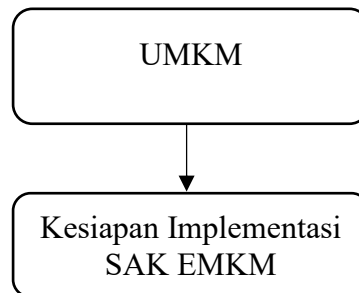
Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayar. Provisi dan liabilitas kontinjensi diakui hanya jika material. Liabilitas berhenti diakui saat telah dilunasi. Modal disetor baik berupa kas maupun nonkas dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran atau yang masih harus diterima baik yang terjadi atau yang akan terjadi. Jika kas yang akan diterima tidak dapat diukur, maka pendapatan diakui pada saat kas diterima. Pendapatan penjualan atau penyediaan jasa diakui ketika barang telah dijual atau jasa telah diberikan. Beban imbalan kerja diakui sebesar nilai tidak terdiskonto. Pembayaran sewa, biaya pinjaman diakui sebagai beban. Jika jumlah kas keluar tidak dapat diukur atau waktu pengeluarannya tidak dapat dipastikan, maka beban diakui pada saat kas dibayar.

C. Kerangka Konseptual

Langkah pertama yang dilakukan yaitu memilih UMKM yang dijadikan sebagai objek penelitian. Selanjutnya, melakukan survei lapangan untuk mengetahui kesiapan UMKM untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan UMKM dapat diketahui dengan menganalisa pemahaman pelaku usaha tentang standar akuntansi keuangan khususnya SAK EMKM. Kemudian menanyakan dan menganalisa apakah UMKM telah melakukan pembukuan secara rutin dan telah berpedoman pada standar akuntansi dalam pembukuannya, menanyakan apakah UMKM mempunyai pegawai khusus pembukuan, apakah terdapat software akuntansi. Yang terakhir yaitu menggabungkan semua informasi dan menyimpulkan apakah UMKM telah siap mengimplementasikan SAK EMKM.



D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini yaitu, kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM yang dapat diketahui dengan menggunakan beberapa kriteria (Rahmawati, T dan Puspasari, O.R : 2016) sebagai berikut :

- 1) Pemahaman UMKM tentang standar akuntansi keuangan.
- 2) Pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi.
- 3) Terdapat pegawai khusus pembukuan.

Informan dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha, dan karyawan bagian keuangan. objek penelitian ini yaitu 3 UMKM pengrajin mebel yang mewakili kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di desa Catak Gayam, Mojowarno. Teknik analisis data

dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan, Sugiyono (2014 : 91).

- 1) Proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu peneliti mendatangi beberapa pengrajin mebel kemudian melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- 2) Proses reduksi dalam penelitian ini yaitu peneliti memilih tiga UMKM yang mewakili kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian memilah informasi-informasi penting yang didapatkan dari ketiga UMKM tersebut dan membuang informasi yang tidak diperlukan.
- 3) Penyajian data dalam penelitian ini yaitu informasi yang telah lolos dalam reduksi data kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Informasi disajikan dalam satu paragraf kemudian dianalisa.
- 4) Penyimpulan dilakukan setelah melakukan analisa pada data yang disajikan dari ketiga UMKM dengan ditambah analisa pada bukti pendukung yang dapat memperkuat dari kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

E. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pemilihan tiga UMKM terpilih yang mewakili kriteria sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih sangat aktif melakukan kegiatan produksi yaitu UD DJ, Mebel Morodadi, dan UD Abadi Jaya Mebel. Hasil penelitian dari ketiga UMKM ini yang akan dikaji untuk menilai kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan EMKM. UD DJ merupakan usaha milik bapak Suhartoto mewakili kriteria usaha skala menengah sesuai dengan kriteria dalam UU No 20 Tahun 2008. UD DJ memiliki jumlah karyawan lepas sebanyak 30 orang. UD Abadi Jaya Mebel milik bapak Wahyudi memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008, dengan jumlah karyawan sebanyak 14 orang. Mebel Morodadi merupakan usaha milik bapak Bahrul Ulum. Mebel Morodadi memenuhi kriteria usaha skala mikro sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008, dengan jumlah karyawan sebanyak 5 orang.

Pemahaman UMKM tentang standar akuntansi keuangan.

Pengetahuan dan pemahaman tentang apa yang akan dilakukan sangat diperlukan. Dengan pengetahuan dan pemahaman itu dapat membantu para pelaku untuk melakukan tindakan yang tepat dalam melakukan suatu pekerjaan.

Berikut ini pernyataan dari para pelaku UMKM saat ditanya mengenai SAK EMKM.

- a. “Wah..tidak tahu saya mbak kalo standar akuntansi, ndak pernah ada sosialisasi”. (pak Wahyudi, UD Abadi Jaya Mebel)
- b. “Ndak tahu mbak itu gimana, pas pelatihan tidak dijelaskan. Pelatihannya ya ngitung pembelian kayu saja”. (pak Bahrul, Mebel Morodadi)
- c. “Tidak tahu, saya tidak pernah pelatihan”. (pak Khusnul, UD DJ)

Dari hasil observasi dan interview kepada UD Abadi Jaya Mebel, UD DJ, dan Mebel Morodadi. Dari keterangan ketiga pelaku usaha tersebut mengaku tidak mengetahui sama sekali tentang standar akuntansi termasuk SAK EMKM. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Rahmawati, T. dan Puspasari O.R. (2016: 537), menemukan bahwa UMKM tidak paham tentang SAK ETAP yang saat itu sudah berlaku. Mereka tidak paham tentang standar akuntansi tersebut dikarenakan belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi tentang SAK ETAP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada UMKM yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah setempat terkait standar akuntansi khususnya SAK EMKM. Meskipun Standar Akuntansi Keuangan EMKM telah berlaku sejak bulan januari 2018. Hal ini mengakibatkan para pengusaha UMKM tidak mengetahui apa itu

standar akuntansi. Jika tidak ada pengetahuan tentang itu maka mereka akan kesulitan untuk menerapkan standar tersebut.

Pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi.

Kesiapan merupakan suatu kondisi yang menjadikan seseorang mampu untuk menghadapi perubahan yang ada. Kesiapan dalam mengimplementasi SAK EMKM dapat dilihat dari kondisi riil yang terjadi di UMKM. UMKM dapat dikatakan siap menerapkan SAK EMKM jika mereka sudah mampu membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peneliti menganalisis kesiapan UMKM melalui kuesioner dan wawancara.

Proses pertama sebelum membuat pembukuan yaitu mencatat transaksi. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara pada 3 UMKM yang menjadi obyek hanya satu UMKM yang melakukan pencatatan keuangan. Sedangkan dua UMKM lainnya hanya mengarsipkan nota.

UD Abadi Jaya Mebel sudah melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana sebatas untuk melaporkan rincian penggunaan kas kedalam buku khusus. pencatatan keuangan yang dibuat UD Abadi terbagi dalam dua buku yaitu buku penjualan dan buku belanja. Buku penjualan berisi transaksi rincian kas yang dikeluarkan untuk pesanan barang. Buku belanja berisi biaya gaji, pembelian bahan, dan biaya lain-lain. Pencatatan tersebut dilakukan secara rutin. Seperti yang diungkapkan oleh pak Rizki (sekretaris).

“Iya tiap ada penjualan atau beli barang ya dicatat mbak. notanya juga disimpan terus. Nota tahun kemarin-kemarin juga masih ada. Pencatatannya juga rutin kan buat laporan ke pemiliknya, buat dicek. Isi catatannya ya bon karyawan berapa nanti dikurangi sama hasil kerjanya itu ketemu selisih hutang atau piutang karyawan”. Sedangkan dua UMKM lainnya tidak melakukan pencatatan transaksi apapun. Mereka hanya mengarsipkan nota pembelian dan penjualan. Seperti yang disampaikan bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi.

“ Nota-nota ini saja mbak yang saya simpen, saya gak pernah nyatet. Nota pas jual barang sama beli kayu ini masih saya simpen buat lihat utang saya, harga kayunya”.

Seperti bapak Bahrul Ulum, Bapak Khusnul sekretaris di UD DJ menyatakan bahwa pada UD DJ tidak pernah ada pencatatan apapun. Beliau hanya mengarsipkan nota penjualan.

“Disini saya gak pernah nyatet mbak, kalo ada pembeli ya dibuatkan nota. Nanti untuk bukti ada penjualan hari ini ya nota itu yang diperiksa sama bos. Kadang yang dikantor bosnya sendiri”.

Ketiga UMKM tidak melakukan pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi keuanagn yang berlaku. Meskipun satu diantaranya telah melakukan pencatatan. Namun pencatatan tidak dilanjutkan dengan proses berikutnya hingga menjadi pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi. Karena hasil catatan yang dibuat UD Abadi Jaya Mebel difungsikan untuk melaporkan kepada pemilik. Pelaporannya hanya dalam bentuk catatan sederhana bukan pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Rizky.

“ Saya buat catetan seperti ini saja mbak buat laporan ke bos. Nanti dicek bosnya uang yang kemarin diberi buat apa aja. Semua dilihat dalam rincian catetan ini. Ndak bikin laporan keuangan mbak”.

Ketiga UMKM tersebut tidak pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi karena alasan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan, karena tidak ada karyawan yang mengetahui tentang akuntansi, usaha milik sendiri. selain itu dari pemilik usaha tidak meminta untuk membuat laporan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi.

“Saya gak buat laporan keuangan mbak. Saya gak ngerti. Sekolah saya sampai tsanawiyah saja. Ya pokonya saya bisa nentukan harga dengan perkiraan pake nota. biar gak rugi saja”.

Selain dari alasan diatas, alasan lainnya yaitu mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun workshop tentang proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga mereka kesulitan untuk membuat pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, terlebih jika mereka ditanya tentang standar akuntansi mereka lebih tidak tahu lagi.

Keterangan dari bapak Wahyudi, pemilik UD Abadi Jaya Mebel.

“ Saya gak buat laporan mbak. Ya karena gak bisa. belum pernah juga mendapatkan pelatihan membuat laporan keuangan. Ya saya catet sederhana saja yang penting saya bisa cek keuangannya”.

Keterangan dari pak Khusnul, UD DJ.

“Gak pernah buat mbak, ya nota ini saja. Kendalanya ya tidak ada karyawan khusus akuntansi, pemiliknya juga tidak ingin buat laporan keuangan. Karena dulu pernah buat laporan keuangan tapi labanya turun-turun lalu karyawan yang bagian keuangan itu keluar. Jadi sekarang udah gak buat laporan lagi. Sosialisasi seperti pelatihan itu pernah ikut tapi sekarang sudah ndak ikut.”

Hasil penelitian ditemukan tidak satupun dari ketiga UMKM memiliki pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Satu diantaranya hanya melakukan pembukuan sederhana berupa pencatatan transaksi harian secara rutin yaitu UD Abadi Jaya Mebel. Sedangkan dua UMKM lainnya yaitu UD DJ dan Mebel Morodadi tidak pernah melakukan pencatatan untuk setiap transaksi. Mereka hanya menyimpan bukti transaksi yang digunakan untuk melihat harga bahan, hutang, dan piutang. Hal ini serupa dengan penelitian Nasa, I.M. dkk (2012: 209) bahwa beberapa UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan. Mereka hanya menyimpan nota penjualan untuk mengetahui apakah piutang sudah dibayar oleh pelanggan. Dan ada sebagian UMKM yang hanya berhenti pada pencatatan transaksi harian yang tertib. Pencatatan tersebut berupa pencatatan transaksi penjualan dan biaya operasional.

Ketiga UMKM tidak membuat pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dengan beberapa alasan yang disampaikan dalam interview. Mereka menyatakan alasan tidak pernah membuat pembukuan, apalagi pembukuan yang sesuai dengan standar. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan tentang proses penyusunan pembukuan yang baik dan benar yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan, pendidikan yang rendah, tidak memiliki SDM yang kompeten dibidang akuntansi, tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau workshop tentang bagaimana proses penyusunan pembukuan yang baik dan benar.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketiga UMKM yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi belum siap untuk menerapkan SAK EMKM. Karena mereka belum pernah membuat pembukuan yang baik dan benar apalagi yang sesuai dengan standar akuntansi masih dirasa sulit bagi UMKM. Untuk itu perlu peran dari pemerintah untuk memberikan pelatihan terkait masalah penyusunan laporan keuangan dan pengenalan tentang SAK EMKM.

Hasil penelitian ini serupa dengan Setiady, M. bahwa UMKM yang tidak siap mengimplementasikan SAK ETAP yaitu UMKM yang tidak pernah menyusun laporan keuangan, tidak memiliki waktu untuk melakukan pencatatan, tidak memiliki SDM yang mampu dalam membuat catatan akuntansi dan laporan keuangan. Hasil penelitian Rahmawati, T. dan Puspasari, O.R (2016: 538) menemukan UMKM yang belum siap untuk mengimplementasikan SAK ETAP yaitu UMKM yang belum paham tentang standar akuntansi tersebut. Dikarenakan sebagian besar dari UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berkepentingan.

Terdapat pegawai khusus pembukuan.

Kesiapan UMKM untuk menerapkan SAK EMKM dapat dinilai dari beberapa persiapan yang ada salah satunya yaitu terdapat pegawai khusus pembukuan. Jika UMKM telah menunjuk satu orang sebagai pengai khusus pembukuan artinya UMKM telah mempersiapkan diri untuk melakukan pembukuan atas kegiatan usahanya. Dengan adanya pegawai khusus dapat dimungkinkan diterapkannya standar akuntansi keuangan khususnya UMKM.

Hasil penelitian menemukan bahwa dari tiga UMKM yang menjadi objek penelitian, tidak satupun dari ketiganya memiliki pegawai khusus untuk pembukuan. Dan ketiganya belum menyelenggarakan pembukuan yang baik dan benar. Seperti dapat diketahui dari pernyataan ketiga UMKM saat ditanya alasan tidak membuat pembukuan yaitu, bahwa tidak ada karyawan yang paham akuntansi atau karyawan yang dikhususkan untuk membuat pembukuan. Seperti pernyataan bapak Khusnul (UD DJ).

“Gak pernah buat mbak, ya nota ini saja. **Kendalanya ya tidak ada karyawan khusus akuntansi**, pemiliknya juga tidak ingin buat laporan keuangan. Karena dulu pernah buat laporan keuangan tapi labanya turun-turun lalu karyawan yang bagian keuangan itu keluar. Jadi sekarang udah gak buat laporan lagi. Sosialisasi seperti pelatihan itu pernah ikut tapi sekarang sudah ndak ikut.”

Pada umumnya pembukuan diselenggarakan secara sederhana oleh pemilik usaha tanpa menggunakan tenaga ahli atau karyawan yang kompeten di bidang akuntansi. Namun kebanyakan para pelaku UMKM tersebut justru tidak pernah membuat pembukuan karena alasan tidak mampu menyusunnya. Seperti pernyataan pak Bahrul pemilik Mebel Morodadi. Beliau menyatakan bahwa semua urusan usahanya ditangani oleh beliau sendiri, namun beliau masih kesulitan untuk menyusun pembukuan yang baik.

“Saya gak buat laporan keuangan mbak. Saya gak ngerti. Sekolah saya sampai tsanawiyah saja. Ya pokonya saya bisa nentukan harga dengan perkiraan pake nota. biar gak rugi saja.”

Hasil yang ditemukan peneliti pada tiga UMKM. Ketiganya tidak memiliki tenaga kerja khusus untuk menangani masalah pembukuan. Dengan alasan usahanya masih belum memerlukan karyawan khusus pembukuan. Dengan adanya karyawan baru juga akan menambah beban biaya yang harus dikeluarkan UMKM. Segala pengelolaan keuangan dipenagang secara langsung oleh pemilik. Namun pemilik juga belum bisa membuat pembukuan yang baik karena alasan pendidikan yang rendah setingkat SMP. Sehingga mereka belum pernah mengetahui tentang pembukuan yang baik dan benar. Begitu pula dengan dua UMKM yaitu UD DJ dan UD Abadi Jaya Mebel belum mampu membuat pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi meskipun tingkat pendidikannya cukup baik yaitu tingkat SMA. Mereka mungkin pernah mendapatkan pengetahuan tentang pembukuan saat dibangku sekolah namun masih belum bisa menerapkan pada pembukuan untuk usaha mereka. Jadi dapat disimpulkan ketiga UMKM yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel dan Mebel Morodadi tidak memiliki tenaga khusus pembukuan. Sehingga mengakibatkan mereka belum siap menerapkan SAK EMKM.

Hasil penelitian ini seperti hasil yang ditemukan oleh Rahmawati, T. dan Puspasari, O.R. (2016), bahwa masih banyak UMKM yang beranggapan bahwa karyawan khusus untuk pembukuan tidak diperlukan dalam usahanya. Karena dianggap menambah pengeluaran pada gaji. Dengan persepsi pelaku UMKM yang demikian ini dapat mengakibatkan belum siapnya UMKM menerapkan SAK EMKM dalam pembukuannya. Karena tidak ada tenaga ahli bidang pembukuan atau akuntansi.

F. Penutup

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan pada 3 UMKM pengrajin mebel desa Catak Gayam, Mojowarno, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya belum siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM dikarenakan,

1. Ketiga UMKM yang menjadi obyek penelitian yaitu UD DJ, UD Abadi Jaya Mebel, dan Mebel Morodadi, belum paham tentang SAK EMKM. Mereka belum pernah tahu apa itu standar akuntansi. Karena mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang standar akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan.
2. UMKM pengrajin mebel desa Catak Gayam, Mojowarno belum menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM. Karena tidak satupun dari mereka memiliki pembukuan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Satu diantaranya hanya melakukan pencatatan transaksi secara sederhana sesuai kebutuhan.
3. Ketiga UMKM tidak memiliki pegawai khusus yang bertanggung jawab untuk membuat pembukuan.

Saran

1. Bagi UMKM khususnya pengrajin mebel desa Catak Gayam, Mojowarno, sebaiknya memperhatikan pentingnya mencatat transaksi dan pengarsipan dokumen yang rapi. Agar ketika sudah mendapatkan sosialisasi, UMKM dapat menyusun laporan keuangan dengan dokumen yang lengkap. Sehingga tidak ada transaksi yang terlewatkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti tentang penerapan SAK EMKM. Dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai upaya lanjutan dari informasi hasil penelitian ini.
3. Bagi pemerintah, sebaiknya segera melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan dan standar akuntansi SAK EMKM. Dalam hal ini diharapkan kegiatan sosialisasi bisa diberikan kepada semua UMKM, termasuk UMKM pengrajin mebel yang berada di Catak Gayam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatchurrochman, Rudy. 2011. *Pengaruh Motivasi Berprestasi Terhadap Kesiapan Belajar, Pelaksanaan Prakerin Dan Pencapaian Kompetensi Mata Pelajaran Produktif*. INVOTEC, Volume VII, No. 2. Hlm 168
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *SAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *SAK Entitas Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta : IAI
- Irwan Rismawan. *Meldoko bilang di Indonesia dan ASEAN UMKM menjadi tulang punggung perekonomian*. <http://m.tribunnews.com>. Diposting pada 16 jan 2018 20:11 WIB.
- Mulyani, Dessy. 2013. *Hubungan Kesiapan Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar*. *KONSELOR | Jurnal Ilmiah Konseling*. Vol 2 No 1. Hlm 27
- Rahmawati, T. dan Puspasari, O.R. 2016. *Mengungkap Kesiapan Implementasi SAK ETAP dalam Menyajikan Laporan Keuangan UMKM Di Kabupaten Kuningan*. Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. Vol 6 No 1. Hlm 532, 537, 538.
- Saugi Riyadi. *Masalah modal dinilai jadi kendala utama pengusaha umkm*. <https://www.jawapos.com/read/2018/02/02/185695/masalah-modal-dinilai-jadi-kendala-utama-pengusaha-umkm>. diposting pada 02 feb 2018 14:28 WIB.
- Tim Konsultan Pajak Russell Bedford SBR. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Russell Bedford SBR Newsletter. Eds 04
- UU NOMOR 20 TAHUN 2008